

Pilkada Serentak Menuju Sejarah

Oleh **Hendra Kurniawan**



RABU 9 Desember 2015, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak digelar. Sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, inilah kali pertama pilkada serentak dilaksanakan. Semakin menarik karena tahun ini juga diperingati 60 tahun pemilu pertama di Indonesia.

Pemilu pertama yang diselenggarakan tahun 1955 diklaim sebagai pemilu paling langsung, umum, bebas, jujur dan adil dibandingkan dengan pemilu-pemilu selanjutnya. Persiapan Pemilu 1955 diselenggarakan oleh pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo. Dinamika politik saat itu dengan demokrasi liberalnya mengakibatkan kabinet tidak ada yang berumur panjang. Kabinet Ali Sastroamidjojo pun tumbang akibat minimnya dukungan DPR. Burhanuddin Harahap dari Masjumi menggantikannya dan berhasil melaksanakan pemilu pertama.

Pemilu 1955 dilaksanakan dua kali. Pertama pada September 1955 untuk memilih anggota DPR. Kedua pada Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante, yang bertugas menyusun konstitusi atau UUD baru pengganti UUD Sementara 1950. Dari hasil Pemilu 1955 ini diperoleh empat partai besar, yakni PNI, Masjumi, NU, dan PKI. Minimnya suara Masjumi membuat kabinet kembali ke tangan Ali Sastroamidjojo.

Saat itu demokrasi berjalan baik sekalipun negara ini belum lama berdiri. Kedewasaan politik yang terbangun boleh jadi disebabkan oleh nuansa nasionalisme dan semangat kebangsaan yang masih begitu kuat pasca kemerdekaan. Bisa pula karena "keluguan" politik yang masih tumbuh subur di tengah masyarakat yang saat itu belum akrab berpolitik. Tentu tak berarti sempurna. Bung Tomo, ketua Partai Rakyat Indonesia (PRI), salah satu peserta pemilu 1955, menyebutkan bahwa praktik pencurian suara, politik uang, dan kampanye hitam dalam arti dan batasan tertentu juga sudah didapati.

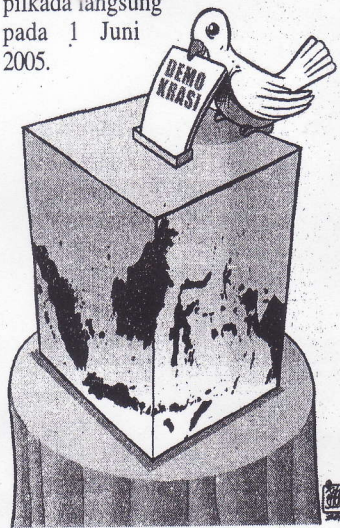
Demokrasi Murah

Tahun 1973 terjadi penyederhanaan sistem kepartaian atau fusi kepartaian.

Akibatnya pemilu pada masa itu jauh dari demokrasi. Memasuki masa Reformasi, sistem kepartaian dan pelaksanaan pemilu mulai diperbaiki. Sampai pada akhirnya tahun 2004 terjadi pemilihan presiden secara langsung. Hal ini lantas diikuti dengan pilkada secara langsung pula.

Usulan pilkada langsung tidak lepas dari jiwa penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya.

Masyarakat cenderung menghendaki agar kepala daerah yang memimpin daerahnya merupakan putra daerah. Mereka yang asli daerah dianggap lebih mengerti potensi dan kebutuhan daerah. Harapannya agar daerah menjadi lebih berkembang karena potensi yang ada di wilayah dikelola secara mandiri. Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah yang pertama kali menyelenggarakan pilkada langsung pada 1 Juni 2005.



Pelaksanaan pilkada langsung bukan tanpa persoalan. Inefisiensi anggaran, tingginya potensi konflik, terlegitimasi "raja-raja kecil" di daerah yang dapat melahirkan dinasti politik, dan sarat praktik korupsi menjadi masalah yang kerap muncul. Berbagai hal inilah yang lantas menjadi argumentasi pihak tertentu pasca Pemilu 2014 untuk menggulirkan wacana pilkada tidak langsung. Pilkada tidak langsung selain menyandera roh demokrasi juga bukan berarti mampu meniadakan persoalan yang muncul dari pilkada langsung. Sebaliknya justru berpotensi menambah berbagai eksese negatif yang sudah muncul.

Hal yang perlu diperbaiki ialah mekanisme dalam berdemokrasi dan bukan prinsip demokrasi. Pilkada serentak didesain untuk menjawab kelemahan pilkada langsung. Pilkada di beberapa daerah dilaksanakan secara bersamaan sehingga lebih hemat ongkos, bisa mengurai kesempatan munculnya dinasti politik, dan kemungkinan antusiasme rakyat untuk memilih menjadi lebih tinggi.

Meski demikian tidak menutup kemungkinan dalam kegiatan kampanye pilkada serentak masih menuai persoalan klasik. Akankah sungguh kampanye berlangsung secara demokratis tanpa anarkis dan mampu menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik?

Politik uang dan kampanye hitam tetap menjadi penyakit yang sulit dihindari sejak dulu. Belum lagi soal rentannya konflik dan kekerasan dalam pilkada. Meskipun sifatnya sangat kasuistik, nyatanya sudah terjadi dalam konvoi kampanye beberapa hari yang lalu di Yogyakarta.

Pada masa Orde Baru, demokrasi dirasa begitu mahal. Kini demokrasi bukan lagi murah namun justru cenderung murahan. Kedewasaan rakyat dalam berpolitik yang dibangga-banggakan bakal temodai apabila acap kali terjadi perilaku kelewat batas yang menjurus anarki. Para elite yang berlaga semestinya jangan hanya gagah dengan janji kampanye, namun juga perlu memperhatikan perilaku para pendukung yang notabene adalah rakyat yang bakal dipimpin.

Para elite harus memberi contoh keteladanan dalam berpolitik agar rakyat tidak menjadi korban. Bercermin dari sejarah pemilu pertama, masyarakat sekarang tentu sudah jauh dari keluguan. Maka yang dapat diwujudkan saat ini ialah penanaman kesadaran untuk dewasa dalam berpolitik. Selain itu internalisasi nilai-nilai kebangsaan juga diperlukan sebagai landasan utama dalam berdemokrasi. Mari semua pihak mendukung pilkada serentak yang tertib dan damai agar kelak sejarah tak ragu mencatatnya dengan tinta emas. (43)

— **Hendra Kurniawan**, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta